

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEUNGGULAN SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

(Analysis of Economic Growth and Advantage of Indonesia Agriculture Sector)

Nur Fitriana

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nangroe Aceh Darussalam

Dwidjono Hadi Darwanto, Slamet Hartono

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The study aims: (1) to measure the growth rate of economic sector based on Gross Domestic Product; (2) to determine contribution of economic sector to GDP; (3) to measure contribution trend of economic sector of GDP and to determine basic sectors in provinces of Indonesia. The data used is secondary data from Badan Pusat Statistik, i.e. Gross Regional Domestic Product and Gross Domestic Product according with 1993 constant price. Data included overall provinces in Indonesia among 1984-2003. Table analysis, Location Quotient, shift-share, and Klassen Typology were used to analyze. The results are: (1) growth rate of GDP is positively fluctuated, except at 1998 due to economic crisis; (2) contribution of agricultural sector; mining and quarrying sector; and services sector were decreased. Contribution of manufacturing industries sector; electricity, gas and water supply sector; trade, restaurant and hotel sector; and transportation and communication sector were increased. Contribution of construction sector and finance and rent of building and business sector were fluctuated; (3) overall sector follow quadratic pattern, except finance, building rent, and business sector that follow linear pattern; (4) agricultural sector was the basic sector in 26 provinces, except in East Kalimantan, Banten, West Java and Jakarta.

Keywords: *Gross Domestic Product, Klassen Typology, location quotient, shift-share*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia merupakan perekonomian yang unik karena Indonesia merupakan negara yang besar dan mempunyai peluang serta potensi yang beragam. Indonesia adalah negara yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, baik besar maupun kecil, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terbagi menjadi banyak wilayah administratif. Pembangunan

negara, mau tidak mau, harus memperhatikan lingkungan dan potensi dari masing-masing wilayah sehingga bisa sesuai dan tepat sasaran.

Saat ini, tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi bukan hanya menciptakan pertumbuhan PDB yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks pembangunan yang terus berkembang. Walaupun begitu, peningkatan PDB sangatlah penting karena bisa dijadikan landasan untuk tujuan-tujuan lainnya.

Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan menganalisis pendapatan provinsi tersebut. Analisis pendapatan tersebut bisa berupa analisis internal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun bisa dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelum tahun 1993, sektor ekonomi yang membentuk PDB dan PDRB dapat dirinci menjadi 11 sektor, dan sesudah tahun 1993, dirinci menjadi sembilan sektor. Rincian sembilan sektor tersebut adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Kondisi ekonomi bisa dilihat secara nasional maupun regional (provinsi). Untuk mengetahuinya maka sektor-sektor tersebut dihitung kontribusi, laju pertumbuhan, analisis sektor unggulan dan *trend* masing-masing sektor. Provinsi yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia berjumlah banyak, dan selama 15 tahun terakhir ini, mengalami perubahan jumlah. Sebelum tahun 1996, NKRI memiliki 27 provinsi. Pada tahun 1997, menjadi 26 provinsi karena Provinsi Timor Timur lepas dari NKRI. Setelah tahun 2000, menjadi 31 provinsi karena ada empat provinsi yang melakukan pemekaran dengan masing-masing provinsi menjadi dua provinsi. Provinsi baru tersebut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo dan Maluku Utara. Pada tahun 2002, kembali ada dua pemekaran, yaitu Sulawesi Barat dan Papua. Jadi setelah itu, total provinsi menjadi 33.

Dalam beberapa tahun, PDB dan PDRB menggambarkan kenaikan dan penurunan pendapatan masyarakat di wilayah yang dianalisis. Kenaikan/penurunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kenaikan/penurunan riil, dimana kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga dan kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan oleh adanya faktor perubahan harga (Tarigan, 2003).

Menurut Tarigan (2003), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun

waktu berikutnya, maka pendapatan tersebut harus dinyatakan dalam nilai riil atau dinyatakan dalam harga konstan. Budiono (1985) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Beberapa teori pertumbuhan yang menyangkut ekonomi nasional adalah teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori Solow-Swan dan teori jalur cepat (*turnpike*). Teori pertumbuhan yang terkait dengan ekonomi regional adalah teori basis ekonomi dan model interregional (Richardson, 1977; Tarigan, 2003).

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang menghasilkan produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Kegiatan nonbasis adalah semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis, atau dengan kata lain kegiatan nonbasis adalah kegiatan yang menghasilkan produk hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal (Tarigan, 2003). Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri.

Richardson (1977) mengatakan bahwa teori basis ekspor (*export base theory*) merupakan bentuk model pendapatan regional yang paling sederhana. Teori ini menyederhanakan suatu sistem regional menjadi dua bagian, yakni daerah yang bersangkutan dan daerah selebihnya. Asumsi pokok dari teori ini yaitu: ekspor adalah satu-satunya unsur otonom dalam pengeluaran.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui sektor unggulan setiap provinsi di Indonesia; (2) untuk mengetahui pertumbuhan PDB dan PDRB; (3) untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB dan PDRB; dan (4) untuk mengetahui *trend* kontribusi sektor ekonomi PDB.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan merupakan data deret waktu tahun 1984-2003 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data berupa data PDB dan PDRB atas dasar harga konstan 1993 yang dirinci menjadi 11 sektor dan sembilan sektor. Data 11 sektor dikonversi menjadi sembilan sektor.

Untuk mengetahui kontribusi sektor maka digunakan analisis tabel. Penghitungan kontribusi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi nasional} = \frac{X_i}{PDB}$$

Keterangan:

X_i = nilai tambah bruto sektor ke-i di tingkat nasional (Rp)

PDB = nilai tambah bruto total sektor (Rp)

Untuk mengetahui suatu sektor menjadi unggulan atau bukan, maka digunakan analisis *location quotient (LQ)*, *shift-share* dan *Typologi Klassen*. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PNB}}$$

Keterangan:

x_i = nilai tambah bruto sektor ke-i di tingkat provinsi (Rp)

X_i = nilai tambah bruto sektor ke-i di tingkat nasional (Rp)

PDRB = nilai tambah bruto total sektor (Rp)

PNB = nilai tambah bruto total sektor (Rp)

$LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional.

$LQ = 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah adalah sama dengan peranan sektor sejenis dalam perekonomian nasional.

$LQ < 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu kurang menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional.

Shift-Share

$$\Delta E_{r,i,t} = (Ns_i + P_{r,i} + D_{r,i})$$

Dimana, $Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$

$$P_{r,i,t} = \left[\frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right] x E_{r,t-n}$$

$$D_{r,i,t} = \left[\frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right] x E_{r,i,t-n}$$

Keterangan:

Δ = pertumbuhan, angka akhir (tahun t) dikurangi angka awal (tahun t-n)

N = *national* atau wilayah yang lebih tinggi jenjangnya

R = *region* atau wilayah analisis

E = nilai tambah (PDB atau PDRB)

AGRO EKONOMI

- i = sektor industri
t = tahun
t-n = tahun awal
 N_s = *national share*
P = *proportional share/industrial mix*
D = *differential shift/regional Shift*

$N_s > P+D$ berarti penentu utama pertumbuhan PDRB adalah *national share*.
 $N_s < P+D$ berarti penentu utama pertumbuhan PDRB adalah *regional share*.

D positif artinya sektor/provinsi tersebut mempunyai daya saing dibandingkan dengan perekonomian yang menjadi referensi (nasional).

D negatif artinya sektor/provinsi tersebut tidak mempunyai daya saing dibandingkan dengan perekonomian yang menjadi referensi (nasional).

Gabungan Analisis LQ dan *shift-share*

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi sektor ekonomi dalam perekonomian di masing-masing provinsi. Kriteria yang digunakan adalah seperti di bawah ini:

Tabel 1. Penentuan Prioritas Sektor Berdasarkan Gabungan Analisis *Location Quotient* dan *Shift-Share*

Prioritas	LQ	PP	D
Utama	≥ 1	+	+
Kedua	≥ 1	-	+
	≥ 1	+	-
Ketiga	< 1	+	+
	< 1	-	+
	< 1	+	-
Kelima	< 1	-	-
Alternatif	≥ 1	-	-

Sumber: Supriyanto *et al. cit.* Ariyani, 2005

Klassen Typologi

Klasifikasi sektor ekonomi menurut *Klassen Typologi* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Sektor Ekonomi Menurut *Klassen Typologi*

Y (kontribusi)			
		$y_i > y$	$y_i < y$
R (pertumbuhan)	$r_i > r$	Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor berkembang cepat
	$r_i < r$	Sektor maju tapi tertekan	Sektor relatif tertinggal

Keterangan : r_i = laju pertumbuhan sektor ke-i
 y_i = kontribusi sektor ke-i terhadap PDRB
 r = laju pertumbuhan PDRB
 y = kontribusi rata-rata sektor PDRB

Analisis Trend

Analisis ini digunakan untuk mengetahui *trend* PDB di masa yang akan datang. Pengujian model dengan uji r^2 , uji F dan uji t.

$$Y = a_0 + a_1T \quad \text{atau} \quad Y = a_0 + a_1T + a_2T^2$$

$$\text{atau} \quad Y = a_0 + a_1T + a_2T^2 + a_3T^3 \quad \text{atau} \quad \log Y = a_0 + a_1 \log T$$

Keterangan:

Y = PDB/PDRB

T = waktu

a_0 = konstanta/*intercept*

a_n = koefisien/*slope*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi PDB Indonesia dan PDRB Provinsi

PDB Indonesia mempunyai rerata laju pertumbuhan sebesar 5,39%. Laju pertumbuhan PDB berfluktuasi di setiap tahun dan bernilai positif, kecuali pada tahun 1998. Laju pertumbuhan PDB tahun 1998 sebesar -11,62% diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Laju pertumbuhan PDB tertinggi sebesar 9,73% terjadi pada 1984, sedangkan laju terendah terjadi pada tahun 1998.

Rerata laju pertumbuhan sektor ekonomi terbesar adalah sektor listrik sebesar 11,21%, kemudian diikuti oleh sektor industri sebesar 7,95%, sektor pengangkutan sebesar 6,67%, sektor perdagangan sebesar 6,13%, sektor sektor keuangan sebesar 5,29%, sektor konstruksi sebesar 5,01%, sektor pertanian sebesar 3,95%, sektor jasa sebesar 3,93% dan sektor pertambangan sebesar 2,73%. Laju pertumbuhan sembilan sektor selama 1984-2003 dapat dilihat pada Tabel 3.

AGRO EKONOMI

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Produk Domestik Bruto Indonesia

Tahun	Sektor									Σ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1984	6,92	4,61	20,83	9,24	5,65	7,11	6,40	23,51	5,28	9,73
1985	3,54	-3,07	11,10	18,32	6,08	6,97	5,57	-0,94	7,25	4,92
1986	6,34	2,89	9,20	10,81	2,30	6,57	5,95	6,51	5,61	6,16
1987	4,05	1,19	10,16	9,09	3,56	6,57	7,62	6,05	3,95	5,64
1988	6,56	0,98	11,13	16,57	9,92	9,58	7,17	5,00	4,27	7,21
1989	5,39	4,28	10,91	12,31	6,40	8,33	8,96	10,49	5,19	7,60
1990	4,66	6,51	10,14	19,63	11,75	8,97	6,92	10,44	4,25	7,83
1991	3,97	3,81	10,37	13,66	11,21	8,46	8,54	5,00	4,57	7,06
1992	6,29	4,61	9,29	10,63	11,74	7,75	8,07	6,10	4,10	7,28
1993	3,59	0,87	9,24	10,85	12,31	8,11	9,09	7,00	5,07	6,80
1994	2,45	2,18	10,89	10,70	11,55	9,84	8,28	8,66	4,07	7,41
1995	5,29	5,40	9,99	11,65	11,40	8,75	8,99	6,23	3,52	7,69
1996	4,72	5,65	10,88	13,11	12,54	9,05	9,99	7,57	4,72	8,34
1997	1,13	0,75	6,24	11,96	4,56	6,72	5,77	6,67	3,40	4,75
1998	-2,30	-2,75	-15,32	0,09	-34,29	-12,29	-6,46	-17,31	-5,75	-11,62
1999	4,67	0,85	1,14	9,75	-2,80	2,18	4,27	-4,82	1,92	1,68
2000	3,00	8,96	11,73	12,96	2,80	3,73	6,76	6,26	2,20	6,36
2001	3,12	2,43	3,75	7,04	2,67	5,04	5,07	2,49	3,82	3,78
2002	3,06	3,75	2,95	9,65	5,42	5,61	8,42	4,67	4,13	4,44
2003	2,53	0,64	4,41	6,27	5,43	5,50	8,09	6,30	7,10	4,73
Rerata	3,95	2,73	7,95	11,21	5,01	6,13	6,67	5,29	3,93	5,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 1984-2003

- Catatan:
- 1 = pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
 - 2 = pertambangan dan pengalihan
 - 3 = industri pengolahan
 - 4 = listrik, gas dan air bersih
 - 5 = konstruksi
 - 6 = perdagangan, hotel dan restoran
 - 7 = pengangkutan dan komunikasi
 - 8 = keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan
 - 9 = jasa-jasa

Kontribusi Sektor Produk Domestik Bruto

Selama periode tahun 1984-2003, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa merupakan sektor yang mempunyai kontribusi menurun. Sektor industri, sektor listrik, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan mempunyai kontribusi yang meningkat, sedangkan sektor konstruksi dan sektor keuangan mempunyai kontribusi yang berfluktuasi. Kontribusi masing-masing sektor PDB Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

AGRO EKONOMI

Tabel 4. Kontribusi Sektor Ekonomi PDB Indonesia Periode 1984-2003

Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
1984	20,38	13,58	17,20	0,67	5,90	15,74	6,44	8,38	11,71	100
1985	20,11	12,54	18,22	0,76	5,96	16,05	6,48	7,91	11,97	100
1986	20,14	12,16	18,74	0,79	5,74	16,11	6,46	7,94	11,91	100
1987	19,84	11,65	19,54	0,82	5,63	16,26	6,59	7,97	11,72	100
1988	19,72	10,97	20,25	0,89	5,77	16,61	6,58	7,80	11,40	100
1989	19,31	10,63	20,88	0,93	5,71	16,73	6,67	8,01	11,14	100
1990	18,74	10,50	21,32	1,03	5,92	16,90	6,61	8,21	10,77	100
1991	18,20	10,18	21,98	1,09	6,15	17,12	6,70	8,05	10,52	100
1992	18,03	9,93	22,39	1,13	6,40	17,20	6,75	7,96	10,21	100
1993	17,49	9,38	22,91	1,17	6,73	17,41	6,90	7,98	10,04	100
1994	16,69	8,92	23,65	1,21	6,99	17,80	6,95	8,07	9,73	100
1995	16,31	8,73	24,15	1,25	7,23	17,98	7,04	7,96	9,35	100
1996	15,77	8,51	24,72	1,31	7,51	18,10	7,14	7,90	9,04	100
1997	15,22	8,19	25,07	1,40	7,50	18,44	7,21	8,05	8,92	100
1998	16,83	9,01	24,02	1,58	5,57	18,30	7,63	7,53	9,52	100
1999	17,33	8,94	23,89	1,71	5,33	18,39	7,83	7,05	9,54	100
2000	16,78	9,16	25,10	1,81	5,15	17,94	7,86	7,04	9,17	100
2001	16,67	9,04	25,09	1,87	5,10	18,15	7,96	6,95	9,17	100
2002	16,45	8,98	24,73	1,96	5,14	18,36	8,26	6,97	9,14	100
2003	16,11	8,63	24,66	1,99	5,18	18,49	8,52	7,07	9,35	100
Rerata	17,81	9,98	22,43	1,27	6,03	17,40	7,13	7,74	10,22	2000

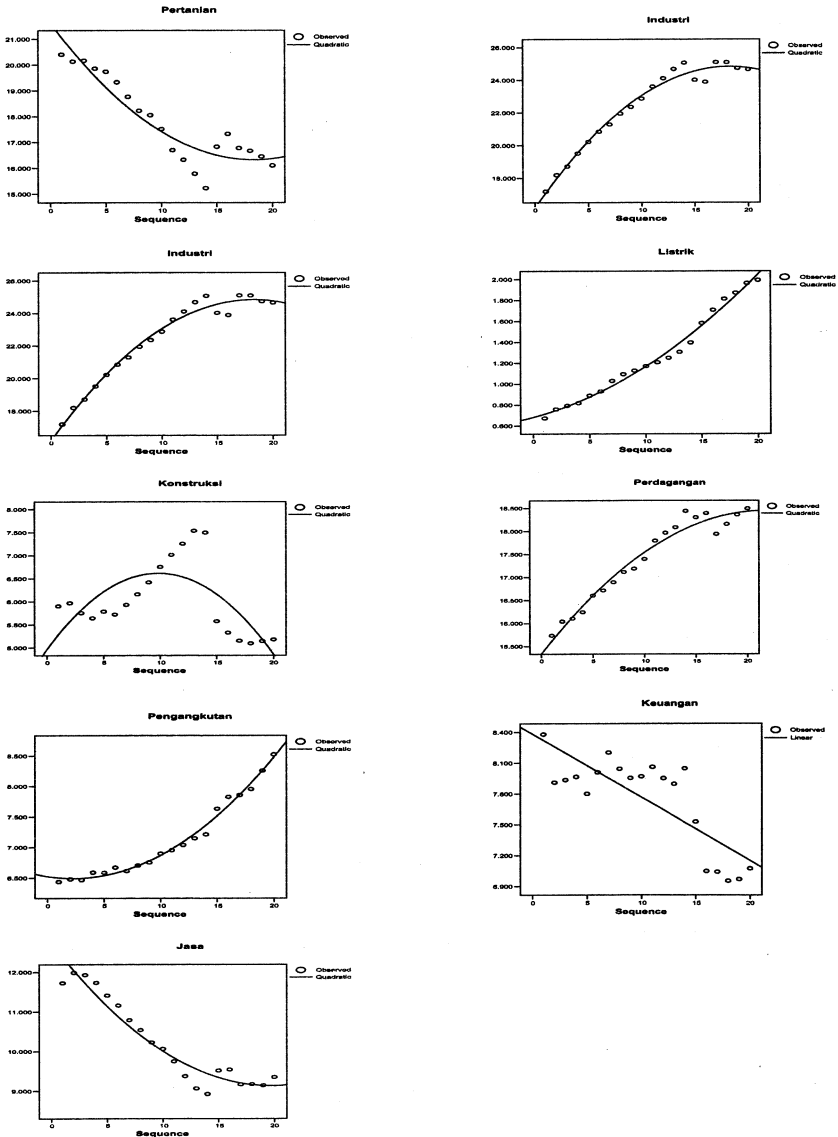
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 1984-2003

- Catatan: 1 = pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
 2 = pertambangan dan penggalian
 3 = industri pengolahan
 4 = listrik, gas dan air bersih
 5 = konstruksi
 6 = perdagangan, hotel dan restoran
 7 = pengangkutan dan komunikasi
 8 = keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan
 9 = jasa-jasa

Peningkatan dan penurunan kontribusi suatu sektor bisa dikarenakan oleh pengaruh dari keadaan negara dan besar kecilnya kontribusi sektor lain. Contoh dari pengaruh keadaan suatu negara adalah bila pada tahun tertentu terjadi krisis ekonomi atau sering terjadi pemogokan kerja maka produksi suatu sektor bisa menurun dan akhirnya kontribusi sektor tersebut bisa menurun. Perubahan kontribusi juga bisa dikarenakan apabila nilai suatu sektor meningkat maka persentase kontribusi sektor tersebut akan besar dan untuk sektor lain yang nilainya tetap maka persentasenya akan menurun atau sebaliknya.

Trend Kontribusi Sektor Ekonomi PDB Indonesia

Trend sembilan sektor ekonomi PDB Indonesia mengikuti dua pola, yaitu kuadratik dan linear. *Trend* kontribusi pola linear diikuti oleh delapan sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor listrik, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan sektor jasa. *Trend* kontribusi pola linear diikuti oleh sektor keuangan. Gambar 1 memperlihatkan *trend* kontribusi sembilan sektor PDB Indonesia.



Gambar 1. *Trend* Kontribusi Sembilan Sektor Ekonomi PDB Indonesia Periode 1984-2003

AGRO EKONOMI

Persamaan *trend* kontribusi yang dirinci per sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 5. Delapan sektor mengikuti pola kuadratik dan satu sektor mengikuti pola linear.

Tabel 5. *Trend* Kontribusi Dirinci per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Periode 1984-2003

Sektor	Konstanta	T	T ²
Pertanian	21,624 ***	-0,577 ***	0,015 ***
Tambang	14,016 ***	-0,686 ***	0,022 ***
Industri	16,176 ***	0,947 ***	-0,025 ***
Listrik	0,682***	0,029***	0,002***
Konstruksi	4,968***	0,335***	-0,017***
Dagang	15,336***	0,286***	-0,007***
Angkut	6,525***	-0,029 **	0,006***
Keuangan	8,383***	-0,062***	-
Jasa-jasa	12,733***	-0,365***	0,009***

Sumber : Perhitungan SPSS

Keterangan : *** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99%

** = signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

Sektor Unggulan Provinsi di Indonesia

Penentuan sektor unggulan ini didasarkan pada hasil analisis *location quotient* (rerata). Hasil dari tiap provinsi dijadikan satu dan dikelompokkan berdasarkan sektor ekonomi.

Dari 31 provinsi Indonesia, sektor pertanian menjadi sektor unggulan pada 29 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Timor-Timur. Sektor pertanian tidak unggulan pada empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan di enam provinsi, yaitu NAD, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Papua. Memang tidak semua wilayah di Indonesia dikaruniai bahan tambang yang melimpah. Ada wilayah yang mempunyai bahan tambang yang melimpah, ada juga wilayah yang memiliki kandungan sedang dan sedikit.

Sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan di enam provinsi. Provinsi tersebut adalah NAD, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor unggulan di enam provinsi. Provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

AGRO EKONOMI

Sektor konstruksi/bangunan menjadi sektor unggulan di 13 provinsi. Provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, DIY, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT dan Timor-Timur.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor unggulan di 10 provinsi. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor unggulan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, DIY, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT dan Papua.

Sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan menjadi sektor unggulan hanya di dua provinsi. Dua provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dan DIY.

Sektor jasa-jasa menjadi sektor unggulan di 21 provinsi. Sepuluh provinsi yang mempunyai sektor jasa bukan sebagai unggulan adalah NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua.

Sektor unggulan yang dimiliki oleh suatu provinsi berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sektor unggulan di masing-masing provinsi pada tahun 1984, 2003 dan rerata LQ selama 20 tahun dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rangkuman Sektor Unggulan Berdasarkan Nilai LQ Atas Dasar Harga Konstan 1993 Periode 1984-2003

Provinsi	1984	2003	Rerata LQ
NAD	Pertambangan (3,27) dan industri (1,3)	Pertanian (1,45), pertambangan (3,62) dan pengangkutan (1,038)	Pertanian (1,14), pertambangan (3,34) dan industri (1,09)
Sumatera Utara	Pertanian (1,34), perdagangan (1,02) dan pengangkutan (1,9)	Pertanian (1,85) dan pengangkutan (1,15)	Pertanian (1,6) dan pengangkutan (1,36)
Sumatera Barat	Pertanian (1,14), listrik (1,12), konstruksi (1,59), pengangkutan (1,84) dan jasa (1,45)	Pertanian (1,39), listrik (1,48), pengangkutan (1,550 dan jasa (1,67)	Pertanian (1,25), listrik (1,1), pengangkutan (1,71) dan jasa (1,6)
Riau	Pertambangan (5,06)	Pertambangan (5,42)	Pertambangan (5,91)
Jambi	Pertanian (1,75), pengangkutan (1,42) dan jasa (1,3)	Pertanian (1,66), pertambangan (1,2), pengangkutan (1,22) dan jasa (1,06)	Pertanian (1,67), pengangkutan (1,39) dan jasa (1,15)
Sumatera Selatan	Pertambangan (1,74) dan industri (1,27)	Pertanian (1,26), pertambangan (1,77), konstruksi (1,17) dan perdagangan (1,06)	Pertanian (1,11), pertambangan (1,83) dan konstruksi (1,03)
Bangka Belitung*	Pertanian (1,54), pertambangan (1,51) dan konstruksi (1,34)	Pertanian (1,33), pertambangan (2,51) dan konstruksi (1,31)	Pertanian (1,45), pertambangan (1,83) dan konstruksi (1,35)
Bengkulu	Pertanian (1,77), konstruksi (1,51),	Pertanian (2,03), pengangkutan (1,76) dan	Pertanian (1,84), konstruksi (1,1),

AGRO EKONOMI

Provinsi	1984	2003	Rerata LQ
Lampung	pengangkutan (2,31) dan jasa (1,91) Pertanian (1,86), konstruksi (1,13), pengangkutan (1,22) dan jasa (1,28)	jasa (1,86) Pertanian (1,96), konstruksi (1,48), pengangkutan (1,19) dan keuangan (1,07)	pengangkutan (2,05) dan jasa (1,93) Pertanian (2,03), konstruksi (1,16), pengangkutan (1,15) dan jasa (1,13)
DKI Jakarta	Listrik (1,61), konstruksi (1,58), perdagangan (1,46), pengangkutan (1,19), keuangan (3,42) dan jasa (1,12)	Listrik (1,06), konstruksi (2), perdagangan (1,32), pengangkutan (1,3) dan keuangan (3,02)	Listrik (1,44), konstruksi (1,88), perdagangan (1,33), pengangkutan (1,21), keuangan (3,02) dan jasa (1,06)
Jawa Barat	Pertanian (1,02), industri (1,26), listrik (1,44), konstruksi (1,08), perdagangan (1,11) dan jasa (1,07)	Industri (1,6) dan listrik (1,62)	Industri (1,37), listrik (1,71) dan perdagangan (1,05)
Banten*	Industri (2,01), listrik (2,33) dan pengangkutan (1,01)	Industri (2) dan listrik (2,27)	Industri (2) dan listrik (2,3)
Jawa Tengah	Pertanian (1,47), industri (1,2), perdagangan (1,2) dan jasa (1,25)	Pertanian (1,17), industri (1,27), perdagangan (1,28) dan jasa (1,05)	Pertanian (1,33), industri (1,25), perdagangan (1,18) dan jasa (1,15)
DIY	Pertanian (1,15), konstruksi (1,69), pengangkutan (1,57), keuangan (1,32) dan jasa (1,86)	Konstruksi (1,69), pengangkutan (1,6), keuangan (1,55) dan jasa (2,09)	Pertanian (1,05), konstruksi (1,5), pengangkutan (1,56), keuangan (1,4) dan Jasa (2,1)
Jawa Timur	Pertanian (1,35), industri (1,13), listrik (1,17), perdagangan (1,07), pengangkutan (1,1) dan jasa (1,29)	Pertanian (1,04), industri (1,02), listrik (1,7), perdagangan (1,26), pengangkutan (1,04) dan jasa (1,16)	Pertanian (1,14), industri (1,1), listrik (1,43), perdagangan (1,15) dan jasa (1,2)
Bali	Pertanian (1,84), konstruksi (1,03), perdagangan (1,32), pengangkutan (1,33) dan jasa (1,16)	Pertanian (1,24), perdagangan (1,65), pengangkutan (1,46) dan jasa (1,63)	Pertanian (1,39), perdagangan (1,58), pengangkutan (1,64) dan jasa (1,47)
Kalimantan Barat	Pertanian (1,58), perdagangan (1,19) dan pengangkutan (1,76)	Pertanian (1,47), konstruksi (1,25), perdagangan (1,12), pengangkutan (1,2) dan jasa (1,33)	Pertanian (1,46), perdagangan (1,16) dan pengangkutan (1,46),
Kalimantan Tengah	Pertanian (2,13), perdagangan (1,2) dan pengangkutan (1,5)	Pertanian (2,5), perdagangan (1,01), pengangkutan (1,21) dan jasa (1,58)	Pertanian (2,24), perdagangan (1,05), pengangkutan (1,55) dan jasa (1,08)
Kalimantan Selatan	Pertanian (1,43), listrik (1,56), konstruksi (1,18), perdagangan (1,07), pengangkutan (1,71) dan jasa (1,03)	Pertanian (1,61), pengangkutan (1,29) dan jasa (1,31)	Pertanian (1,4), listrik (1,11), perdagangan (1,01) pengangkutan (1,48) dan jasa (1,03)
Kalimantan Timur	Pertambangan (3,64) dan industri (1,39)	Pertambangan (3,8), industri (1,22) dan pengangkutan (1,34)	Pertambangan (3,44), industri (1,38) dan pengangkutan (1,21)
Sulawesi Utara	Pertanian (1,13), konstruksi (2,27), pengangkutan (2) dan jasa (2,15)	Pertanian (1,63), konstruksi (2,08), pengangkutan (1,9) dan jasa (1,57)	Pertanian (1,59), konstruksi (1,87), pengangkutan (1,99) dan jasa (1,87)
Gorontalo*	Pertanian (1,8), konstruksi (1,4), pengangkutan (1,11) dan jasa (1,84)	Pertanian (1,78), konstruksi (1,4) dan jasa (2,1)	Pertanian (1,79), konstruksi (1,41) dan Jasa (2)

AGRO EKONOMI

Provinsi	1984	2003	Rerata LQ
Sulawesi Tengah	Pertanian (1,59), konstruksi (1,53), pengangkutan (1,46) dan jasa (1,78)	Pertanian (2,82), konstruksi (1,27) dan jasa (1,53)	Pertanian (2,14), konstruksi (1,34), pengangkutan (1,25) dan jasa (1,71)
Sulawesi Selatan	Pertanian (2,09), listrik (1,2), perdagangan (1,04), keuangan (1,02) dan jasa (1,15)	Pertanian (2,05), pengangkutan (1,04) dan jasa (1,29)	Pertanian (2,13) dan jasa (1,22)
Sulawesi Tenggara	Pertanian (1,92), konstruksi (1,75), pengangkutan (1,58) dan jasa (1,27)	Pertanian (1,84), konstruksi (1,67), pengangkutan (1,53) dan jasa (1,72)	Pertanian (1,89), konstruksi (1,74), pengangkutan (1,39) dan jasa (1,79)
NTB	Pertanian (2,25), konstruksi (1,13), pengangkutan (1,06) dan jasa (1,65)	Pertanian (1,56), pertambangan (3,24), konstruksi (1,19), pengangkutan (1,15) dan jasa (2,33)	Pertanian (2,09), konstruksi (1,16), pengangkutan (1,26) dan jasa (1,7)
NTT	Pertanian (2,33), konstruks i (1,26), pengangkutan (1,12) dan jasa (1,51)	Pertanian (2,2), konstruksi (1,13), pengangkutan (1,3) dan jasa (2,66)	Pertanian (2,29), konstruks i (1,27), pengangkutan (1,36) dan jasa (2,03)
Maluku	Pertanian (1,81), perdagangan (1,39) dan jasa (1,15)	Pertanian (2,01), per- dagangan (1,23), peng- angkutan (1,14), keuang- an (1,02) dan jasa (2,25)	Pertanian (1,79), perdagangan (1,13) dan jasa (1,37)
Maluku Utara*	Pertanian (1,69), perdagangan (1,29) dan jasa (1,05)	Pertanian (1,69), perdagangan (1,29) dan jasa (1,05)	Pertanian (1,72), perdagangan (1,26) dan jasa (1,04)
Papua	Pertambangan (4,28)	Pertanian (1,19) dan pertambangan (6,27)	Pertanian (1,08), pertambangan (5,38) dan konstruksi (1,1)

Sumber: BPS (diolah), 1984-2003

Catatan: * = provinsi yang diresmikan tahun 2000 sehingga pada kolom tahun 1984 diisi dengan data tahun 2000

Dari hasil analisis *shift share*, diketahui bahwa umumnya pertumbuhan PDRB semua provinsi dipengaruhi oleh pertumbuhan di tingkat nasional. Hal ini bisa dilihat dari nilai *national share* lebih besar dari *regional share*. Ini berarti perekonomian semua provinsi masih ada ketergantungan yang besar terhadap nasional. Otonomi daerah belum menunjukkan hasil yang maksimal dan daerah masih menggantungkan aliran dana dari pusat serta belum mengembangkan potensi daerah secara maksimal.

Penentu utama pertumbuhan ekonomi semua provinsi adalah *national share* namun bila dilihat nilai *differential shift* PDRB, maka ada beberapa provinsi yang mempunyai nilai positif. Ini artinya PDRB provinsi tersebut lebih berdaya saing dibandingkan dengan PDRB provinsi lain yang nilai *differential shift*-nya negatif karena pertumbuhan PDRB salah satunya dipengaruhi oleh perubahan internal provinsi walaupun pengaruhnya tidak sebesar perubahan ekonomi pusat.

Apabila dilihat secara sektoral maka ada beberapa sektor dalam suatu provinsi yang mempunyai daya saing/keunggulan kompetitif bila dibandingkan dengan sektor yang sejenis pada perekonomian nasional. Hal ini bisa dilihat dari nilai *differential shift* masing-masing sektor yang bernilai positif. Nilai *differential shift* dapat dilihat pada Tabel 7.

AGRO EKONOMI

Tabel 7. Rangkuman Klasifikasi Sektor Ekonomi Berdasarkan Analisis *Shift-Share* Atas Dasar Harga Konstan 1993 Periode 1984-2003

Provinsi	N > P+D	D _i positif
NAD	√	Pertanian, konstruksi, keuangan dan jasa
Sumatera Utara	√	Pertanian, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, keuangan dan jasa
Sumatera Barat	√	Pertanian, pertambangan, listrik dan jasa
Riau	√	Pertanian, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa
Jambi	√	Pertanian, pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan jasa
Sumatera Selatan	√	-
Bangka Belitung*	√	Pertambangan, industri, konstruksi dan jasa
Bengkulu	√	Pertanian, pertambangan, industri, listrik, perdagangan, keuangan dan jasa
Lampung	√	Pertanian, pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan keuangan
DKI Jakarta	√	Konstruksi dan pengangkutan
Jawa Barat	√	Industri, listrik dan keuangan
Banten*	√	-
Jawa Tengah	√	Pertambangan, industri, listrik, perdagangan dan pengangkutan
DIY	√	Pertambangan, keuangan dan jasa
Jawa Timur	√	Pertambangan, perdagangan dan keuangan
Bali	√	Industri, listrik, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa
Kalimantan Barat	√	Pertanian, pertambangan, listrik, konstruksi, perdagangan, keuangan dan jasa
Kalimantan Tengah	√	Pertanian, pertambangan, listrik, konstruksi dan jasa
Kalimantan Selatan	√	Pertanian, pertambangan, industri, keuangan dan jasa
Kalimantan Timur	√	Listrik, konstruksi, pengangkutan, keuangan dan jasa
Sulawesi Utara	√	Pertanian, pertambangan
Gorontalo*	√	Pertanian, pertambangan, industri, listrik, konstruksi, keuangan dan jasa
Sulawesi Tengah	√	Pertanian, pertambangan, listrik, konstruksi, sektor keuangan dan jasa
Sulawesi Selatan	√	Pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan jasa
Sulawesi Tenggara	√	Pertanian, pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa
NTB	√	Pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa
NTT	√	Pertambangan, pengangkutan, keuangan dan jasa
Maluku	√	-
Maluku Utara*	√	-
Papua	√	Pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa

Sumber: BPS (diolah), 1984-2003

Catatan: N = *national share* D = *differential shift* PDRB
P = *proportional share*, D_i = *differential shift* sektor ekonomi PDRB
* = provinsi yang diresmikan tahun 2000 sehingga data tahun 2000-2003

AGRO EKONOMI

Berdasarkan analisis *Klassen Typologi*, maka sektor ekonomi diklasifikasikan ke dalam empat sektor. Hasil dari analisis pada masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rangkuman Klasifikasi Sektor Berdasarkan Nilai Rerata *Typologi Klassen* Atas Dasar Harga Konstan 1993 Periode 1984-2003

Provinsi	I	II	III	IV
NAD	Pertanian, pertambangan	Industri	Konstruksi	Listrik, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa
Sumatera Utara	Pertanian	Pengangkutan dan keuangan	Listrik, konstruksi dan perdagangan	Pertambangan, industri dan jasa
Sumatera Barat	Pertanian dan listrik	Pengangkutan dan jasa	Pertambangan	Industri, konstruksi, perdagangan dan keuangan
Riau	-	Pertambangan	Pertanian, industri, listrik, konstruksi, perdagangan dan pengangkutan	Keuangan dan jasa
Jambi	Pertanian dan pengangkutan	Jasa	Pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan	Keuangan
Sumatera Selatan	-	Pertanian dan pertambangan	-	Industri, listrik, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa
Bangka Belitung*	Pertambangan, konstruksi	Pertanian	Jasa	Industri, listrik, perdagangan, pengangkutan dan keuangan
Bengkulu	Pertanian dan pengangkutan	Konstruksi dan jasa	Pertambangan, industri, listrik dan perdagangan	Keuangan
Lampung	Pertanian, konstruksi dan pengangkutan	Jasa	Pertambangan, industri, listrik dan perdagangan	Keuangan
DKI Jakarta	Konstruksi dan pengangkutan	Listrik, perdagangan, keuangan dan jasa	-	Pertanian dan industri
Jawa Barat	Industri dan listrik	Jasa	-	Pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan keuangan
Banten*	-	Industri, listrik dan pengangkutan	Pertambangan, perdagangan dan keuangan	Pertanian, konstruksi dan jasa
Jawa Tengah	Industri dan perdagangan	Pertanian dan jasa	Pertambangan, listrik dan pengangkutan	Konstruksi dan keuangan
DIY	-	Konstruksi, pengangkutan,	Pertambangan	Pertanian, industri, listrik dan

AGRO EKONOMI

Provinsi	I	II	III	IV
Jawa Timur	Perdagangan	keuangan dan jasa Pertanian, industri, listrik, keuangan dan jasa	Pertambangan	perdagangan Konstruksi dan pengangkutan
Bali	Perdagangan dan pengangkutan	Pertanian, keuangan dan jasa	Industri dan listrik	Pertambangan dan konstruksi
Kalimantan Barat	Pertanian dan perdagangan	Pengangkutan, keuangan dan jasa	Pertambangan, listrik dan konstruksi	Industri
Kalimantan Tengah	Pertanian	Pengangkutan dan jasa	Pertambangan, listrik dan konstruksi	Industri, perdagangan dan keuangan
Kalimantan Selatan	Pertanian	Listrik, pengangkutan dan jasa	Pertambangan	Industri, konstruksi, perdagangan dan keuangan
Kalimantan Timur	Industri dan pengangkutan	Pertambangan	Pertanian, listrik, konstruksi dan perdagangan	Keuangan dan jasa
Sulawesi Utara	Pertanian	Konstruksi, pengangkutan dan jasa	Pertambangan	Industri, listrik, perdagangan dan keuangan
Gorontalo*	Pertanian, kons- truksi dan jasa	Pengangkutan	Tambang dan keuangan	Industri, listrik dan perdagangan
Sulawesi Tengah	Pertanian dan konstruksi	Pengangkutan dan jasa	Pertambangan dan listrik	Industri, perdagangan dan keuangan
Sulawesi Selatan	Pertanian	Keuangan dan jasa	Pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan dan pengangkutan	Listrik
Sulawesi Tenggara	Pertanian, konstruksi dan pengangkutan	Jasa	Pertambangan, industri, listrik dan perdagangan	Keuangan
NTB	Pertanian, konstruksi dan pengangkutan	Jasa	Pertambangan dan perdagangan	Industri, listrik dan keuangan
NTT	Pengangkutan	Pertanian, konstruksi dan jasa	Pertambangan dan perdagangan	Industri, listrik dan keuangan
Maluku	-	Pertanian, perdagangan, keuangan dan jasa	Pertambangan dan konstruksi	Industri, listrik dan pengangkutan
Maluku Utara*	-	Pertanian, perdagangan, pengangkutan dan jasa	Listrik	Pertambangan, industri, konstruksi dan keuangan
Papua	Pertanian, pertambangan dan konstruksi	-	Industri, perdagangan, pengangkutan dan keuangan	Listrik dan jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Catatan: I = sektor maju dan tumbuh cepat

II = sektor maju tapi tertekan

III = sektor tumbuh cepat

IV = sektor relatif tertinggal

* = provinsi yang diresmikan tahun 2000 sehingga data tahun 2000-2003

Keunggulan Sektor Pertanian

Indonesia merupakan negara agraris. Tanah yang dimiliki banyak yang subur sehingga banyak penduduknya yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dijadikan sektor utama pada pembangunan Indonesia sampai tahun 1991.

Sektor pertanian selama Pembangunan Lima Tahun I (Pelita I) sampai pembangunan di masa reformasi mempunyai nilai tambah yang meningkat terus, baik bila nilai tambah dihitung dengan harga berlaku maupun harga konstan. Laju pertumbuhan sektor pertanian bernilai positif kecuali pada tahun 1998 karena terpengaruh oleh krisis ekonomi yang melanda Asia.

Kontribusi sektor pertanian selalu di atas 15% bahkan pernah pada tahun 1984 mencapai 20,4% dari PDB Indonesia. Pada tahun 1984-1987, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi pada PDB terbesar. Setelah itu, kontribusinya digeser oleh kontribusi sektor industri sehingga kontribusi sektor industri sedikit demi sedikit menjadi lebih besar. Pada tahun 2003, sektor pertanian menjadi kontributor di peringkat ketiga karena posisinya kembali digeser oleh sektor lain, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Di tingkat provinsi, sektor pertanian masuk menjadi tiga sektor dominan di hampir semua provinsi, bahkan sektor pertanian selalu mempunyai peranan terbesar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Timor-Timur. Di provinsi selain provinsi tadi, sektor pertanian tetap masuk ke dalam tiga sektor dominan. Provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Papua, DIY, Jawa Timur, NAD, Riau, Jawa Barat, Banten dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1984-1996, sektor pertanian Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam tiga sektor dominan, namun setelah itu, peringkatnya turun menjadi penyumbang ke lima.

Peranan pertanian provinsi dipengaruhi oleh keadaan alam yang dimiliki, teknologi budidaya, konversi lahan dan hukum waris, kondisi pertumbuhan sektor lain dan dukungan pemerintah. Apabila suatu provinsi memiliki lahan yang cocok digunakan untuk usaha pertanian atau mempunyai perairan yang mempunyai banyak ikan, maka sektor pertanian di provinsi tersebut cenderung memberikan nilai tambah yang besar. Usaha pertanian tersebut meliputi usaha budidaya tanaman pangan, kehutanan, peternakan maupun perikanan. Teknologi budidaya pertanian sangat penting artinya karena dengan penerapan teknologi yang tepat, maka hasil pertanian akan besar dan produktivitas meningkat sehingga pada akhirnya nilai tambah menjadi besar. Adanya konversi lahan akan menyebabkan penurunan hasil pertanian dan pemecahan lahan akibat adanya hukum waris bisa menyebabkan menurunnya produktivitas. Peranan pertanian juga dipengaruhi oleh peranan sektor lain, misalnya suatu provinsi memiliki

banyak kandungan alam berupa bahan tambang dan bahan galian, maka apabila dieksploitasi, nilai tambah sektor pertambangan besar dan kontribusinya besar sehingga bisa mengurangi peranan sektor pertanian di sektor tersebut. Contoh provinsi yang memiliki kontribusi terbesar dari sektor pertambangan adalah Riau, sedangkan provinsi yang memiliki kontribusi terbesar pada sektor industri adalah Jawa Barat. Dukungan pemerintah juga penting karena pemerintah bisa mendukung atau tidak sektor pertanian. Hal tersebut dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kemampuan menjaga keamanan yang stabil dan penyediaan infrastruktur.

Sektor pertanian menjadi sektor yang dominan di banyak provinsi, namun nilai kontribusinya semakin lama cenderung menurun. Kontribusi sektor pertanian tahun 1984 dibandingkan kontribusi pada tahun 2003 maka ada yang meningkat ataupun menurun. Provinsi yang kontribusinya meningkat jauh lebih sedikit dari provinsi yang kontribusinya menurun. Provinsi tersebut adalah NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Selama tahun 1984-2003, persentase kontribusi sektor pertanian selalu di atas angka 15%, kecuali untuk Riau, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Timur.

Pada tahun 1984, sektor pertanian menjadi unggulan di 20 provinsi, kemudian naik pada tahun 2003 menjadi 25 provinsi. Berdasarkan rerata nilai LQ, sektor pertanian unggul di 26 provinsi. Peningkatan jumlah provinsi yang menjadikan sektor pertanian menjadi unggulan pada tahun 2003 dibandingkan tahun 1984 disebabkan oleh beberapa hal. Alasannya adalah tiga provinsi pemekaran mempunyai nilai LQ sektor pertanian lebih besar dari satu dan kontribusi sektor pertanian di tingkat nasional lebih menurun dibandingkan kontribusinya di tingkat provinsi. Hasil perhitungan LQ pada tahun 1984-2003 dan rerata selama 20 tahun dapat dilihat pada Tabel 9.

Peranan sektor pertanian yang semakin lama dikurangi merupakan hal yang umum terjadi di negara berkembang. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di negara agraris lain. Kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah pengurangan peranan sektor pertanian dan pemberian kesempatan bagi sektor lain terutama sektor industri untuk lebih berkembang. Khusus untuk Indonesia, pengurangan peranan ini bisa dilihat pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari tiap periode pembangunan.

AGRO EKONOMI

Tabel 9. *Location Quotient* Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Dirinci Per Provinsi

No	Provinsi	LQ			Keterangan
		1984	2003	Rerata	
1	NAD	0,83	1,45	1,14	U
2	Sumatera Utara	1,33	1,85	1,60	U
3	Sumatera Barat	1,14	1,39	1,25	U
4	Riau	0,27	0,57	0,40	BU
5	Jambi	1,75	1,66	1,67	U
6	Sumatera Selatan	0,95	1,26	1,11	U
7	Bangka Belitung*	1,53	1,33	1,45	U
8	Bengkulu	1,77	2,03	1,84	U
9	Lampung	1,86	1,96	2,03	U
10	DKI Jakarta	0,03	0,01	0,02	BU
11	Jawa Barat	1,02	0,86	0,92	BU
12	Banten*	0,57	0,57	0,57	BU
13	Jawa Tengah	1,47	1,17	1,33	U
14	DIY	1,15	0,99	1,04	U
15	Jawa Timur	1,35	1,04	1,15	U
16	Bali	1,84	1,24	1,39	U
17	Kalimantan Barat	1,58	1,47	1,46	U
18	Kalimantan Tengah	2,13	2,50	2,24	U
19	Kalimantan Selatan	1,43	1,61	1,40	U
20	Kalimantan Timur	0,43	0,51	0,54	BU
21	Sulawesi Utara	1,13	1,63	1,49	U
22	Gorontalo*	1,80	1,78	1,79	U
23	Sulawesi Tengah	1,59	2,82	2,14	U
24	Sulawesi Selatan	2,09	2,05	2,12	U
25	Sulawesi Tenggara	1,92	1,84	1,89	U
26	NTB	2,25	1,56	2,09	U
27	NTT	2,33	2,20	2,29	U
28	Maluku	1,81	2,01	1,79	U
29	Maluku Utara*	1,69	1,77	1,72	U
30	Papua	0,99	1,19	1,08	U

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Catatan: U = unggulan
 BU = bukan unggulan

Peranan sektor pertanian yang berkurang akan membawa dampak positifnya, seperti semakin majunya sektor non-pertanian dan mata pencaharian lebih terspesialisasi. Sektor non-pertanian yang biasa lebih diutamakan untuk berkembang adalah sektor industri pengolahan (manufaktur) dan jasa. Semakin berkembangnya sektor non-pertanian maka

AGRO EKONOMI

semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk mempunyai mata pencaharian di bidang non-pertanian. Dengan kata lain, terjadi transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian.

Berdasarkan perhitungan gabungan LQ dan *shift-share*, maka sektor pertanian menjadi sektor yang diprioritaskan kedua pada NAD, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua. Sektor pertanian menjadi sektor prioritas ketiga pada provinsi Riau. Sektor pertanian menjadi sektor prioritas kelima pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Timur. Sektor pertanian menjadi sektor prioritas alternatif di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Timor-Timur.

Pada masa krisis ekonomi, sektor pertanian terbukti mampu menyediakan kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran yang diakibatkan krisis. Sektor ini mampu bertahan dibandingkan dari sektor lain karena input sektor ini sebagian besar berasal dari sumberdaya domestik. Strategi pembangunan dengan pendekatan *domestic base development* sangat bagus diterapkan karena strategi ini berusaha mengoptimalkan sumberdaya domestik yang dimiliki. Sektor pertanian merupakan sektor yang menggunakan konsep *domestic base development*. Oleh karena itu, sektor pertanian perlu ditingkatkan terus nilai tambahnya sekaligus peranannya.

Sering terjadi dilema dalam pembuatan strategi pembangunan. Apakah akan mengutamakan sektor pertanian ataukah sektor industri. Hal ini terjadi karena dua sektor ini saling berpengaruh, misalnya apabila sektor industri lebih dikembangkan maka sektor pertanian akan semakin terdesak peranannya. Salah satu pemecahan masalah yang ditawarkan adalah strategi gabungan dari keduanya adalah sektor pertanian dan sektor industri dapat dikembangkan bersama-sama yaitu dengan pengembangan agroindustri. Agroindustri merupakan industri yang berbasis pertanian. Apabila agroindustri semakin berkembang maka Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya dengan bahan baku industri yang berasal dari luar negeri karena bahan baku tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri (domestik). Jadi, ada hubungan yang saling menguntungkan antara dua sektor ini. Hasil-hasil pertanian dari dalam negeri digunakan sebagai bahan baku dari suatu industri, misal kelapa sawit yang dijadikan bahan baku industri minyak goreng, tembakau untuk industri rokok, kapas untuk industri tekstil dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

1. Laju pertumbuhan PDB berfluktuasi dan bernilai positif, kecuali pada tahun 1998, akibat dari terjadinya krisis ekonomi. Penentu utama pertumbuhan perekonomian di semua provinsi adalah *national share* (pertumbuhan di wilayah secara nasional).
2. Dalam PDB, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian dan sektor jasa berkontribusi cenderung menurun. Sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi berkontribusi meningkat. Sektor konstruksi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa mempunyai kontribusi yang berfluktuasi.
3. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa mempunyai *trend* kontribusi mengikuti pola kuadrat. Sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai *trend* kontribusi mengikuti pola kuadrat. Sektor konstruksi mempunyai *trend* kontribusi yang mengikuti pola kuadrat, sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berfluktuasi namun mempunyai *trend* mengikuti pola linear.
4. Sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pertambangan, pertanian dan industri; Provinsi Sumatera Utara adalah pertanian dan pengangkutan; Provinsi Sumatera Barat adalah pengangkutan, jasa, pertanian dan listrik; Provinsi Riau adalah pertambangan; Provinsi Jambi adalah pertanian, pengangkutan dan jasa; Provinsi Sumatera Selatan adalah pertambangan, pertanian dan konstruksi; Provinsi Bangka Belitung adalah pertambangan, pertanian dan konstruksi; Provinsi Bengkulu adalah pengangkutan, jasa, pertanian dan konstruksi; Provinsi Lampung adalah pertanian, konstruksi, pengangkutan dan jasa; Provinsi DKI Jakarta adalah keuangan, konstruksi, listrik, perdagangan, pengangkutan dan jasa; Provinsi Jawa Barat adalah listrik, industri dan perdagangan; Provinsi Banten adalah listrik dan industri; Provinsi Jawa Tengah adalah pertanian, industri, perdagangan dan jasa; Provinsi DIY adalah jasa, pengangkutan, konstruksi, keuangan dan pertanian; Provinsi Jawa Timur adalah listrik, jasa, pertanian, perdagangan dan industri; Provinsi Bali adalah pengangkutan, perdagangan, jasa dan pertanian; Provinsi Kalimantan Barat adalah pengangkutan, pertanian dan perdagangan; Provinsi Kalimantan Tengah adalah pertanian, pengangkutan, jasa dan perdagangan; Provinsi Kalimantan Selatan adalah pengangkutan, pertanian, listrik, jasa, perdagangan; Provinsi Kalimantan Timur adalah pertambangan, industri dan pengangkutan; Provinsi Sulawesi Utara adalah pengangkutan, jasa, konstruksi dan pertanian; Provinsi Gorontalo

adalah jasa, pertanian dan konstruksi; Provinsi Sulawesi Tengah adalah pertanian, jasa, konstruksi dan pengangkutan; Provinsi Sulawesi Selatan adalah pertanian dan jasa; Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pertanian, jasa, konstruksi dan pengangkutan; Provinsi NTB adalah pertanian, jasa, konstruksi dan pengangkutan; Provinsi NTT adalah pertanian, jasa, pengangkutan dan konstruksi; Provinsi Maluku adalah pertanian, jasa dan perdagangan; Provinsi Maluku Utara adalah pertanian, perdagangan dan jasa dan Provinsi Papua adalah pertambangan, pertanian dan konstruksi.

5. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan di hampir semua provinsi, kecuali Provinsi Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1984-2003. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 1984-2003. *Pendapatan Nasional Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 1984-2003. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ariyani, 2005. Peran dan Identifikasi Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Wonogiri. *Tesis*. Yogyakarta: Magister Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada.
- Budiono, 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Richardson, H. W., 1977. *Elements of Regional Economics* (Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Alih bahasa oleh Paul Sihotang). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tarigan, R., 2003. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara.